

PERAN INOVASI 'JOGJAPLAN' DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

The Role of 'Jogjaplan' Innovation in Increasing Public Participation in Governance of The Special Region of Yogyakarta Province

Kautsar Ramadhan ^{*1}

Kevin Febrian²

^{*1} Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara, Ciawi, Jawa Barat, Indonesia

*email:
kautsar.ramadhan94@gmail.com

Abstrak

Di banyak negara berkembang, masih banyak ditemui instansi sektor publik yang masih belum memiliki kapasitas untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan salah satu institusi yang kini sedang gencar melaksanakan berbagai perbaikan pelayanan publik melalui inovasi. Salah satu bentuk inovasi yang diwujudkan ialah aplikasi Jogjaplan yang merupakan sistem berbasis e-planning atau perencanaan elektronik yang juga mampu mewujudkan dan bahkan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan akses informasi serta keberadaan wadah aspirasi perencanaan pembangunan bagi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran inovasi berupa aplikasi Jogjaplan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur berdasarkan buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dan situs resmi pemerintah yang relevan. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan hasil bahwa Jogjaplan terbukti dapat mempermudah proses perencanaan dari segi pemrosesan data dan dokumen. Namun, pemanfaatan aplikasi Jogjaplan pada konteks partisipasi masyarakat masih belum optimal. Masyarakat yang mengakses dan memberikan usulan terkait perencanaan program di D.I.Y masih terbilang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap publik yang juga diperparah dengan rendahnya responsivitas dari sisi pemerintah terhadap usulan yang diberikan oleh masyarakat.

Kata Kunci:

Jogjaplan
Inovasi
Partisipasi masyarakat Perencanaan pembangunan

Keywords:

Jogjaplan
Innovation,
Public participation Development planning

Abstract

In many developing countries, there are still many public sector institutions that do not yet have the capacity to provide good quality public services. The Provincial Government of D.I. Yogyakarta is one of the institutions that is currently intensively carrying out various public service improvements throughout innovations. One of many innovations that has been implemented is an application called Jogjaplan, which is an e-planning (electronic planning) system that is also capable in not just actualizing, but also making improvement in public participation through open access towards information and by creating a public forum for aspirations regarding development planning. This study aims to determine the role of innovation in the form of the Jogjaplan application in increasing community participation in the governance of the Province of D.I. Yogyakarta. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of literature studies based on relevant books, scientific journals, news articles, and official government websites. Based on this research, Jogjaplan was proven to be capable of simplifying the planning process in terms of processing data and documents. However, the use of the Jogjaplan application in the context of public participation is still not optimal. The number of people who access and provide suggestions regarding program planning in D.I.Y is still relatively low. This is due to the lack of socialization carried out by the local government to the public which is also exacerbated by the low responsiveness of the government towards the inputs made by the public.

PENDAHULUAN

Pada rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya, negara melalui pemerintah pusat

maupun daerah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Di Indonesia sendiri, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai suatu kegiatan atau rangkaian prosedur dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pernyataan tersebut menandakan tugas pelayanan publik adalah memastikan kualitas kerjanya untuk melayani masyarakat (Aneta et al., 2018; Yusriadi et al., 2017). Pada era reformasi belakangan ini, pelayanan publik didesak untuk dapat melakukan pembenahan sistem dan manajemen kelembagaan yang terdesentralisasi serta dilakukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan konseptualisasi *good governance* (Story, 2009).

Meskipun penyediaan pelayanan publik telah dilakukan sedemikian mungkin dengan konsep yang lebih terdesentralisasi, pemerintah masih berada di bawah tekanan untuk terus meningkatkan kinerja sektor publik. Di banyak negara berkembang, masih banyak ditemui instansi sektor publik yang tidak dikelola dengan baik dan tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah belum mampu memenuhi kepuasan pelanggan, dalam hal ini masyarakat atas pelayanan publik yang telah disediakan (Suphattanakul, 2014). Hal ini kemudian menjadi fokus pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Upaya-upaya seperti penetapan standar pelayanan, penciptaan inovasi, peningkatan kapasitas standar pelayanan untuk mempercepat pelayanan, mendorong pelayanan yang akurat, terjangkau dan transparan telah dilakukan oleh pemerintah (Aneta et al., 2018).

Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan salah satu institusi yang kini sedang gencar melaksanakan berbagai perbaikan pelayanan publik melalui inovasi. Pemprov D.I.Y. menyadari adanya kelemahan dalam penyediaan pelayanan publik, khususnya pada tahap perencanaan. Mereka sering kali menemui berbagai permasalahan, seperti tidak efektif dan efisiennya waktu yang dibutuhkan, serta kurang adanya alat untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, mereka juga mempertimbangkan kurangnya transparansi yang berujung pada menurunnya partisipasi masyarakat (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020). Hal ini tentu perihal yang cukup penting mengingat bahwa pelayanan publik ditujukan semata-mata untuk masyarakat, sehingga perlu adanya suara dari masyarakat untuk membantu pemerintah memahami kebutuhan dan kemauan mereka secara lebih baik. (Suphattanakul, 2014) berpendapat bahwa pemerintahan modern kini condong pada gagasan pemerintahan yang “berpusat pada warga/masyarakat”. Partisipasi Masyarakat sebagai bentuk dari keterlibatan masyarakat dinilai sebagai kunci keberhasilan organisasi memimpin.

Partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga negara dalam pengembangan kebijakan dinilai sangat menonjol dalam reformasi sektor publik (Bourgon, 2007). Sasaran utama dari partisipasi masyarakat adalah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mengumpulkan informasi tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Suphattanakul, 2014). Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Provinsi Yogyakarta telah menciptakan suatu inovasi pelayanan publik yang dinamai Jogjaplan. Jogjaplan merupakan sistem perencanaan

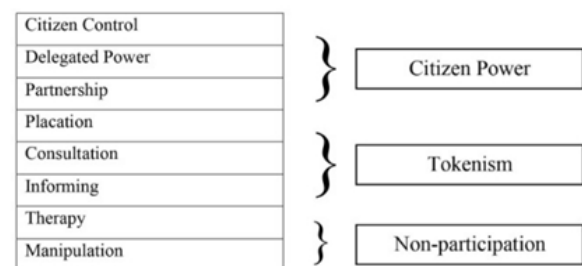
pembangunan pelayanan publik berupa aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk ikut memantau sekaligus memberikan rekomendasi terkait pelayanan publik di Yogyakarta (Kamim et al., 2018). Pemerintah berharap bahwa dengan adanya aplikasi ini, pelayanan publik di Yogyakarta dapat dibangun dengan lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran karena adanya alat pengambilan keputusan yang memadai yang juga berdasarkan pada aspirasi masyarakat (Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016).

Secara umum, inovasi dipahami sebagai proses dinamis yang mengidentifikasi masalah, tantangan dan pengembangan ide-ide kreatif baru, serta pemilihan dan implementasi solusi baru. De Vries et al. (2016) menjelaskan bahwa penggerak inovasi dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Lingkungan, yaitu menekankan bahwa inovasi berasal dari ko-evolusi sebagai akibat dari tuntutan dan tekanan yang dibawa oleh lingkungan. Secara khusus, beberapa faktor dalam kategori ini meliputi tekanan lingkungan, hubungan antar organisasi, hubungan, dan persaingan dengan organisasi lain.
2. Organisasi, yaitu menegaskan bahwa inovasi berasal dari aspek struktural dan budaya organisasi, yang meliputi sumber daya, gaya kepemimpinan, pembelajaran organisasi, insentif, konflik, dan struktur organisasi.
3. Individu, di mana individu dalam organisasi terkadang memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan inovasi.

Pada konteks administrasi publik, khususnya pada aplikasi Jogjaplan, inovasi digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat atau partisipasi publik diartikan sebagai kondisi di mana individu atau warga negara memiliki inisiatif dalam

berpartisipasi dalam proses perencanaan sebuah kebijakan, sehingga kepentingan mereka sebagai orang pribadi atau sebagai kelompok orang pribadi diketahui (Arbter et al., 2007). Selama beberapa dekade, pemerintah di semua tingkatan telah memprakarsai program partisipasi masyarakat, dengan latar belakang bahwa jika warga negara berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan kebijakan dan demokrasi, kebijakan yang dirumuskan sebagai hasil dari proses ini akan lebih realistis, dan pemerintahan yang dihasilkan akan lebih baik, lebih demokratis dan efektif (Irvin & Stansbury, 2004).



Gambar 1. Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat oleh Arnstein

Sumber: (Satries, 2011)

Dalam pelaksanaannya, terdapat delapan jenis partisipasi masyarakat yang dapat menjadi suatu acuan atau tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Untuk tujuan ilustratif, delapan jenis disusun dalam pola tangga dengan masing-masing anak tangga sesuai dengan tingkat kekuatan warga dalam menentukan produk akhir. Anak tangga terbawah adalah *Manipulation* (manipulasi) dan *Therapy* (perbaikan). Kedua anak tangga ini menggambarkan tingkat "non-partisipasi" yang telah dibuat oleh pembuat program/kebijakan untuk menggantikan partisipasi yang sebenarnya. Masyarakat di sini hanya menjadi objek dalam suatu program. Artinya, keterlibatan masyarakat dalam suatu program tidak didasari oleh keinginan masyarakat

itu sendiri untuk berpartisipasi. Anak tangga ketiga dan keempat telah ada pada tingkat "tokenisme" yang terdiri dari *Informing* (pemberian informasi), *Consultation* (konsultasi), dan *Placation* (peredaman kemarahan atau penenteraman) yang berturut-turut menempati tangga ketiga, keempat, dan kelima termasuk ke dalam kategori tokenisme (pertanda), karena tiga hal tersebut ditujukan untuk sekadar meredam keresahan masyarakat dengan cara mewadahi ide, kritik, dan saran dari masyarakat.

Lebih jauh ke atas tangga terdapat *Citizen Power* atau kekuasaan warga dengan meningkatnya derajat pengaruh pengambilan keputusan dan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang sesungguhnya telah mulai terjadi. Warga dapat masuk ke dalam *Partnership* (kemitraan) yang memungkinkan mereka untuk bernegosiasi dan terlibat dalam suatu transaksi dengan pemegang kekuasaan. Pada anak tangga paling atas, terdapat *Delegated Power* (kekuasaan yang didelegasikan) dan *Citizen Control* (kontrol warga negara), dimana masyarakat pada tahap ini dapat ikut serta dalam memegang kontrol atau kendali akan suatu program yang dijalankan oleh pemerintah setempat. Tahap partisipasi inilah yang disebut Arnstein sebagai kekuasaan masyarakat (Arnstein, 1969; Satries, 2011). Model partisipasi masyarakat ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana peran Jogjaplan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengidentifikasi jenis partisipasi masyarakat yang terwujud.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membantu proses penelitian dengan jenis penelitian deskriptif. Sementara itu, metode yang digunakan pada penelitian ini

menggunakan jenis studi kasus yaitu untuk mendalami suatu kasus tertentu secara mendalam, berupa penggunaan aplikasi Jogjaplan yang diiringi dengan berbagai macam sumber informasi.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui studi literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dan situs resmi pemerintah. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik kualitatif menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1994), di mana terdapat tiga langkah yang harus dilakukan saat menganalisis data kualitatif sebagai berikut: (1) Reduksi Data, proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang muncul dari hasil studi literatur; (2) Penyajian Data, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi; (3) Pengambilan Kesimpulan dan verifikasi, dilakukan untuk memperkuat data-data yang ingin disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jogjaplan merupakan suatu inovasi pelayanan publik berupa aplikasi berbasis *e-planning* atau perencanaan elektronik yang diciptakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta beserta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) D.I. Yogyakarta semenjak tahun 2010. Aplikasi ini juga merupakan alat bantu dalam proses perencanaan pembangunan pelayanan publik dengan sasaran utama untuk mendukung perencanaan yang efektif serta akuntabel yang juga terdapat akses akan keterbukaan informasi yang mampu mendorong partisipasi dari publik atau masyarakat. Aplikasi Jogjaplan dimanfaatkan Bappeda DIY sebagai alat untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan dokumen perencanaan lainnya, serta dimanfaatkan juga sebagai wadah bagi suara masyarakat DIY (Mesakh, 2020).

Aplikasi Jogjaplan dibuat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui website dengan pertimbangan bahwa pemerintah di berbagai negara kini sedang menggencarkan penggunaan e-government atau pemerintahan berbasis elektronik mengingat tingginya efektivitas dan efisiensi proses kerja yang dihasilkan dibandingkan apabila menggunakan teknik konvensional (Nam, 2019). Di samping itu, D.I. Yogyakarta memiliki Indeks Penggunaan TIK yang cukup tinggi, begitu juga dari segi akses, penggunaan, dan keahlian (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi Jogjaplan oleh masyarakat mengingat bahwa sebagian besar masyarakat telah terbiasa dengan penggunaan TIK.

Pembuatan aplikasi Jogjaplan umumnya dilatarbelakangi oleh besarnya tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai di Bappeda DIY dalam hal penyusunan RKPD, KUA, PPAS, maupun dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Ditambah lagi dengan banyaknya human error yang terjadi sehingga menyebabkan proses perencanaan yang terkesan tidak efektif dan justru lambat. Di samping itu, pembuatan aplikasi Jogjaplan juga dilatarbelakangi oleh proses perencanaan yang dinilai masih kurang transparan partisipatif (Kamim et al., 2018). Berdasarkan hal tersebut, inovasi Jogjaplan dapat dikatakan terdorong akan adanya dua faktor, yaitu organisasi dan lingkungan (De Vries et al., 2016). Faktor organisasi dapat dilihat dari sistem perencanaan Bappeda DIY yang tidak luput dari banyaknya kesalahan serta proses birokrasi yang panjang yang tentunya sangat

memengaruhi kinerja Bappeda DIY secara keseluruhan. Di samping itu, terdapat juga faktor lingkungan, dimana adanya kebutuhan akan partisipasi dan suara masyarakat sebagai entitas yang terpengaruh oleh adanya pembangunan daerah dibarengi oleh tuntutan dari publik akan adanya pengawasan yang demokratis. Hal ini juga sejalan dengan salah satu faktor pendorong pelayanan publik oleh European Parliament (2020), yaitu tuntutan masyarakat.

Aplikasi Jogjaplan diharapkan dapat memberantas permasalahan-permasalahan di atas dengan mendorong adanya otomatisasi pada proses pendataan dokumen perencanaan sehingga memastikan adanya kecepatan dan ketepatan pada proses perencanaan. Di samping itu, Jogjaplan juga menyediakan akses informasi bagi publik terkait dengan pembangunan di DIY sehingga terdapat transparansi dalam prosesnya yang tentunya dapat mengurangi penyelewengan yang dilakukan oleh administrator dan memastikan bahwa proses perencanaan berlangsung sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada. Jogjaplan juga menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai pendapat dan opininya terkait dengan keberlangsungan perencanaan pembangunan di DIY. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui serta merespon tanggapan dari masyarakat. Dengan adanya keleluasaan akses informasi, masyarakat juga dapat ikut memantau proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bappeda DIY (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020).

Berdasarkan fokus dan tujuannya, aplikasi Jogjaplan dapat diklasifikasikan sebagai penggabungan antara keempat jenis inovasi (De Vries et al., 2016), yaitu process innovation atau

inovasi proses, product or service innovation atau inovasi pada barang/jasa, governance innovation atau inovasi pada tata kelola, serta conceptual innovation atau inovasi konseptual. Proses inovasi proses dapat dilihat pada fungsi Jogjaplan sebagai alat pemroses data atau dokumen perencanaan yang semula dilakukan secara manual kini dilakukan secara otomatis melalui aplikasi. Inovasi jasa atau service innovation dapat dilihat dari tersedianya wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat terkait perencanaan serta tersedianya pelayanan berupa informasi publik yang kini tersedia secara online sehingga lebih mudah diakses. Inovasi tata kelola merupakan tujuan utama dari Jogjaplan, dimana Pemprov dan Bappeda DIY mengharapkan adanya perubahan pada birokrasi dan tata kelola pada tahap perencanaan di mana terdapat peningkatan fungsi serta efektivitas dan efisiensi pada prosesnya. Selain itu, inovasi konseptual juga menjadi tujuan utama dari aplikasi ini, dimana terwujudnya konsep good governance melalui adanya transparansi informasi, akuntabilitas dari individu maupun lembaga terkait, serta pelibatan akan partisipasi masyarakat.

Inovasi berbasis e-planning ini diakui sebagai salah satu terobosan yang cemerlang, dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang diperoleh Jogjaplan. D.I. Yogyakarta berhasil meraih juara I Pangripta Nusantara Utama Tahun 2015, dimana D.I.Y memperoleh predikat sebagai daerah dengan perencanaan yang sangat baik. Jogjaplan juga masuk dalam 25 inovasi layanan publik Nasional teratas di Tahun 2015 dan peringkat lima besar kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 yang keduanya diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Astiti, 2016; Bappeda Daerah Istimewa

Yogyakarta, n.d.). Bahkan sepuluh tahun setelah lahirnya konsep Jogjaplan ini, tepatnya pada 2020, Jogjaplan kembali mendapatkan penghargaan, yaitu pada kategori *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* oleh Kementerian PAN RB (Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020). Tidak berhenti disitu, aplikasi Jogjaplan telah menjadi percontohan sistem e-planning di ratusan pemerintah kota/kabupaten dan setidaknya sepuluh kementerian (Mesakh, 2020).

Selain fungsinya sebagai alat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perencanaan pembangunan, khususnya pada pengelolaan dokumen dan laporan, Jogjaplan juga dibuat sebagai perwujudan akan partisipasi masyarakat di D.I. Yogyakarta. Partisipasi masyarakat merupakan pilar penting dari demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara umum, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai adanya keterlibatan masyarakat pada proses dan tahapan pengambilan keputusan di sektor pemerintahan (Zellatifanny et al., 2021), di mana dalam konteks Jogjaplan ada pada tahap perencanaan pembangunan di lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini diwujudkan Bappeda D.I.Y. melalui berbagai fitur pada aplikasi Jogjaplan, salah satunya melalui pengisian usulan masyarakat yang umumnya dibuka 24 jam semenjak mulainya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga mendekati Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD (Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, n.d.). Di samping itu, secara umum masyarakat D.I. Yogyakarta dapat dengan leluasa menyampaikan rekomendasinya terkait program yang sedang pada tahap perencanaan di forum Usulan Masyarakat tersebut dengan menyertai proposal maupun dokumen-dokumen relevan lainnya (Kamim et al.,

2018; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2015).

Guna mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat dan rekomendasinya terkait perencanaan pembangunan di D.I.Y., Pemprov D.I.Y. menyediakan data publik pada website Jogjaplan yang berkaitan dengan informasi program perencanaan lengkap beserta RKPD dan penggunaan anggaran program. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat ikut memantau proses perencanaan dan memberikan berbagai masukan terkait (Kamim et al., 2018). Penyediaan informasi tersebut merupakan bagian dari transparansi dan juga akuntabilitas lembaga, dimana terdapat hubungan erat antara partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Partisipasi masyarakat tidak akan mungkin terjadi tanpa transparansi, dan transparansi juga akan mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Sedangkan akuntabilitas sulit dicapai tanpa adanya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Mardiyanta, 2013; Zellatifanny et al., 2021). Ketiga hal tersebut merupakan beberapa prinsip ataupun pilar dari good governance. Adanya hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi (Arista, 2015).

Meski dinilai memiliki fitur yang cukup baik yang mampu mendorong partisipasi masyarakat, nyatanya pemanfaatan dari Jogjaplan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat belum maksimal. Belum banyak sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, sehingga belum banyak pula masyarakat yang mengetahui keberadaan aplikasi ini. Imbasnya adalah partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan

melalui aplikasi Jogjaplan juga dinilai belum signifikan (Kamim et al., 2018). Hal ini cukup disayangkan mengingat bahwa masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat terkait program-program tertentu yang dinilai belum efektif atau bahkan belum tersebar dengan baik di desa-desa, sehingga membutuhkan adanya respon dari masyarakat dalam mendorong optimalnya suatu perencanaan (Kamim et al., 2018). Di samping itu, tingginya Indeks Penggunaan TIK, yang juga dari segi akses, penggunaan, dan keahlian di D.I. Yogyakarta seharusnya dapat mengakselerasi pengimplementasian aplikasi ini. Namun sayangnya hal tersebut belum dibarengi dengan adanya sosialisasi dan edukasi secara luas oleh pemerintah. Salah satu sasaran utama dari aplikasi ini adalah dapat mewujudkan partisipasi masyarakat pada tingkat citizen control, dimana masyarakat memiliki kontrol akan perencanaan di D.I. Yogyakarta melalui saran dan rekomendasi yang diberikan. Pada kenyataannya, aplikasi ini terlihat baru mampu mewujudkan partisipasi masyarakat di tingkat tokenisme, dimana pelaksanaannya baru sekadar untuk meredam keresahan masyarakat dengan cara mewadahi ide, kritik, dan saran dari masyarakat (Arnstein, 1969). Hal ini terlihat dari kurangnya respon yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta akan usulan yang diberikan oleh masyarakat. Di tahun 2017 dan 2018 sendiri hanya ada 15 usulan yang diberikan oleh masyarakat yang hampir seluruhnya belum direspon baik oleh pihak lembaga (Kamim et al., 2018). Apabila hal ini terus berlanjut, tentunya partisipasi masyarakat melalui aplikasi Jogjaplan akan semakin menurun mengingat bahwa kurangnya responsivitas dari pihak pemerintah tentunya akan menurunkan pula tingkat keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

KESIMPULAN

Jogjaplan merupakan inovasi pelayanan publik yang tidak hanya memiliki manfaat bagi organisasi dalam hal mempermudah proses perencanaan dari segi pemrosesan data dan dokumen, namun juga merupakan alat yang digadang-gadang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan di D.I. Yogyakarta. Meskipun dianggap memiliki fitur yang cukup baik, pemanfaatan aplikasi Jogjaplan pada konteks partisipasi masyarakat masih belum optimal. Masyarakat yang mengakses dan memberikan usulan terkait perencanaan program di D.I.Y masih terbilang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui aplikasi ini. Rendahnya responsivitas dari sisi pemerintah juga menyebabkan kurang berartinya pemanfaatan dari aplikasi ini. Hal tersebut juga justru akan semakin menurunkan tingkat keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

Adapun saran atau rekomendasi yang diberikan guna meningkatkan pemanfaatan dari aplikasi Jogjaplan, antara lain:

1. Pemerintah D.I.Y. dapat mengencangkan kembali sosialisasi akan aplikasi ini, yang salah satunya dapat dilakukan melalui media sosial. Sosialisasi dapat dilakukan secara interaktif dan dikemas dengan baik sehingga dapat menarik perhatian masyarakat;
2. Menambahkan fitur yang ada pada Jogjaplan sehingga masyarakat akan merasakan lebih banyak manfaat dari aplikasi tersebut yang juga akan mendorong penggunaan yang lebih luas. Interface pada website Jogjaplan juga dapat dibuat lebih menarik dan juga lebih

mudah diakses (seperti adanya panduan penggunaan) sehingga dapat juga menjangkau masyarakat yang dinilai belum terlalu melek teknologi, khususnya dari masyarakat yang lebih berumur; serta;

Meningkatkan interaktivitas dan responsivitas dari sisi Pemprov D.I.Y. Pemerintah harus memastikan bahwa usulan yang diberikan oleh masyarakat tidak hanya didengar, namun juga direspon. Hal ini akan meyakini masyarakat bahwa partisipasi yang dilakukannya benar-benar memberikan kontribusi dan tidak hanya sebagai tokenisme semata. Dengan begitu, masyarakat akan lebih terdorong untuk terus berpartisipasi

REFERENSI

- Amelia, R. R., & Yuwono, D. T. (2024). Supporting learning information system through knowledge management optimization using long short-term memory method. *KnE Social Sciences*, 361–371.
- Aneta, A., Aneta, Y., & Dama, H. (2018). Institutional Problems in Regional Public Services. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 8(2), 79–86. <https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7877>
- Arbter, K., Handler, M., Purker, E., Tappeiner, G., & Trattnigg, R. (2007). The public participation manual - Shaping the future together. Austrian Society for Environment and Technology.
- Arista, D. (2015). Transparansi informasi situs web pemerintah daerah di sulawesi selatan sebagai implementasi keterbukaan informasi publik. Universitas Hasanuddin.
- Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Astiti, A. (2016). Inovasi “Jogjaplan” – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2020. BPS Republik Indonesia.
- Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). Jogjaplan (e-planning). <http://bappeda.jogjaprov.go.id/produk/detail/Aplikasi-Perencanaan>

- Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. (2016). Jogjaplan - Perencanaan yang Baik untuk DIY Lebih Maju. Bappeda Jogja. <https://www.youtube.com/watch?v=pbhbu cuseJk&t=46s>
- Bourgon, J. (2007). The future of public service : A search for a new balance. *The Australian Journal of Public Administration*, 67(4), 390–404.
- De Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2016). Innovation in the Public Sector: A Systematic Review And Future Research Agenda. *Public Administration*, 94(1), 146–166. <https://doi.org/10.1111/padm.12209>
- European Parliament. (2020). Public sector innovation Concepts, trends and best practices. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651954/EPRS_BRI\(2020\)651954_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651954/EPRS_BRI(2020)651954_EN.pdf)
- Irvin, R., & Stansbury, J. (2004). Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort? *Public Administration Review*, 64(1), 55–65. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00346.x>
- Kamim, A., Khandiq, M., & Amal, I. (2018). Jogjaplan dan Kelompok Warga Pengawal Anggaran dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(2), 27–53. <https://doi.org/10.22146/jps.v5i2.44634>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2015). Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Jogjaplan, Sebuah Keterbukaan Pengelolaan Perencanaan di D.I Yogyakarta. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/jogjaplan-sebuah-keterbukaan-pengelolaan-perencanaan-di-d-i-yogyakarta>
- Mardiyanta, A. (2013). State of the art: Konsep partisipasi dalam ilmu administrasi publik. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 26(4), 227–242.
- Mesakh, E. (2020). Dua Aplikasi DIY: Jogja Belajar Class dan Jogjaplan Lolos ke 5 Besar dan 3 Terbaik Nasional. *Surya Yogya*. <https://suryayogya.com/2020/07/08/dua-aplikasi-diy-jogja-belajar-class-dan-jogjaplan-lolos-ke-5-besar-dan-3-terbaik-nasional/2/>
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nam, T. (2019). Does E-Government Raise Effectiveness and Efficiency?: Examining the Cross-National Effect. *Journal of Global Information Management (JGIM)*, 27(3). <https://doi.org/10.4018/JGIM.2019070107>
- Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. (n.d.). SOP Usulan Masyarakat melalui Jogjaplan. [http://jogjaplan.jogjaprov.go.id/2022_permendagri90/dokumen/SOP Usulan Masyarakat melalui Jogjaplan_flowchart_final.pdf](http://jogjaplan.jogjaprov.go.id/2022_permendagri90/dokumen/SOP%20Usulan%20Masyarakat%20melalui%20Jogjaplan_flowchart_final.pdf)
- Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. (2020). Sinovik DIY Raih Outstanding Achievement dari Kemenpan-RB. <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/9018-sinovik-diy-raih-outstanding-achievement-dari-kemnepan-rb>
- Satries, W. (2011). Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. *Jurnal Kybernan*, 2(2), 89–130.
- Story, R. (2009). *Large Group Scenario Planning. The Change Handbook: The Definitive Resource on Today's Best Methods for Engaging Whole Systems*. Berrett-Koehler Publishers.
- Suphattanakul, O. (2014). The Impact of Public Participation on the Perception of Service Quality with the Moderating Effect of Organizational Culture in Local Government in Thailand. *Journal of Administrative Science*, 11(1). https://jas.uitm.edu.my/images/ARCHIEVE_2014/6.pdf
- Yusriadi, Akib, H., & Ihsan, A. (2017). Bureaucratic Reform in Public Service: A Case Study on the One Stop-Integrated Service. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 8(2), 253–258. <https://doi.org/10.5901/mjss.2017.v8n2p253>
- Zellatifanny, C., Rumata, V., & Sakinah, A. (2021). The impact of public information awareness and service towards public engagement. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(2). <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3477>
- Yuwono, D. T., Hariyanti, A., & Yunanri, W. (2024). Applying Clustering and Recommendation System for Effective Supervision in Central Kalimantan Inspectorate. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (Jinteks)*, 6(2), 367–374.